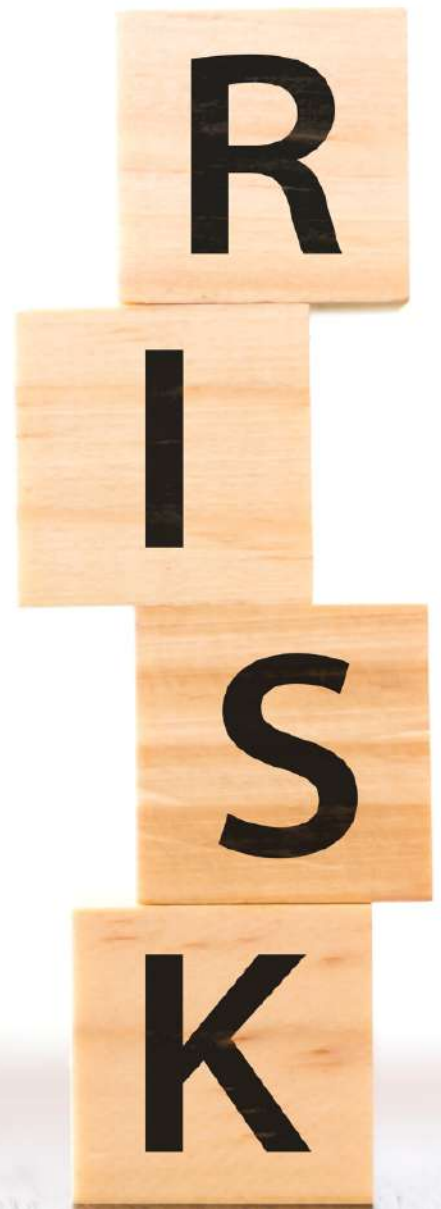


RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG 2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat (1), setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, BAPPEDA Kabupaten Temanggung perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Maka bersama dengan ini kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung ini telah dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini berisikan perbaikan lingkungan pengendalian yang diharapkan, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim SATGAS SPIP BAPPEDA yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh karyawan/karyawati BAPPEDA yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST.MT

Pembina

NIP. 19740508 2001312 1 008

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup	4
II.	PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	10
	A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	10
	B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pegendalian.....	14
III.	PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	16
	A. Penetapan Tujuan	16
	B. Hasil Identifikasi Risiko.....	19
	C. Hasil Analisis Risiko.....	19
	D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan.....	21
	E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	23
IV.	RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	27
IV.	RANCANGAN PEMANTAUAN	30
VI.	PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung	13
Tabel 2.2	Penilaian Pengendalian Yang Belum Memadai.....	14
Tabel 2.3	Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	15
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung	16
Tabel 2.5	Penetapan Konteks Risiko Operasional PD	17
Tabel 2.6	Besarnya level dampak/konsekuensi	20
Tabel 2.7	Skala Probabilitas Risiko/Kemungkinan pada Bappeda Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.8	Kegiatan Pengendalian yang sudah dilakukan.....	22
Tabel 2.9	Kegiatan Pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan.....	23
Tabel 2.10	Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun	27
Tabel 2.11	Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah perlu menyusun dokumen terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya berupa Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko. Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko yang dibuat oleh Unit Pemilik Risiko.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan tindak lanjut/ langkah dari UU Nomor 1 Tahun 2004, BAPPEDA Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Tindak Pengendalian Operasional sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan Negara dengan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Rencana Tindak Pengendalian Operasional BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini prioritas untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAPPEDA Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan SPIP, yang didorong oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rancangan tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan penyelenggaraan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
10. Salinan Peraturan badan Pengawas Keuangan dan pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah; dan
11. Peraturan Deputi Bidang pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta

pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian Operasional atas pelaksanaan tugas pokok BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Melalui rencana tindak pengendalian ini, diharapkan dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang akan ditetapkan dalam *Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023* dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional dimaksudkan untuk :

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
2. Mengintegrasikan Program Reformasi Birokrasi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dalam Sistem pengendalian Intern Pemerintah.
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Temanggung; dan
4. Pendokumentasian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan SPIP pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

D. Ruang Lingkup

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan hal tersebut SPIP merupakan satu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 (lima unsur), yaitu

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.

Dalam instansi pemerintah wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif, untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakkan Integritas dan Nilai Etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Dalam hal tersebut Tim SATGAS BAPPEDA Kabupaten Temanggung melakukan Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian melalui tahapan:

- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui review dokumen (lampiran 1 form 1.a)
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE) (lampiran 1 form 1.a); dan
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan (lampiran 1 form 1.c).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dengan hal tersebut maka pimpinan wajib untuk melakukan penilaian risiko.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko serta sistem pengendalian intern , dengan tujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun external;
- b. Melakukan perangkingan risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko Tim SATGAS BAPPEDA melakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) Penentuan tujuan, sebagai target terukur (bersifat spesifik, dapat dicapai realistis, terikat waktu dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai) yang

mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya;

Dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan maka menetapkan:

- a) Strategi Operasional yang konsisten;
 - b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
- 2) Identifikasi Risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi yang mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
 - 3) Analisis Risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Dalam penetapan konteks risiko pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional BAPPEDA berdasarkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 yaitu pada tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” (lampiran 1 form 2.a). Dari tujuan tersebut BAPPEDA Kabupaten Temanggung terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Pada sub kegiatan tersebut memiliki risiko masing masing (lampiran 1Form 3.c). Kemudian dari masing-masing risiko yang teridentifikasi, maka dari Tim SATGAS BAPPEDA melakukan penilaian dengan skala dampak dan skala kemungkinan (lampiran 1 form 4). Dengan hasil penilaian

skala risiko tersebut Tim melaksanakan analisis sehingga Tim menentukan skala risiko yang tinggi dengan skor 15-20 sehingga menjadi skala prioritas penilaian risiko yang harus ditindaklanjuti (lampiran 1 form 5a).

3. Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu *prevention* dan *mitigation*.

Pada kegiatan pengendalian dimaksud yang harus dikendalikan pada BAPPEDA antara lain:

- a. Pengendalian atas kelemahan lingkungan (lampiran 5 form 6);
- b. Pengendalian atas kelemahan risiko strategis (lampiran 5 form7)

Dengan hal tersebut diatas Rencana Tindak Pengendalian BAPPEDA yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun atau melakukan penyempurnaan kebijakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, Bappeda Kabupaten Temanggung harus (lampiran 5 form 8):

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Dalam rangka perbaikan atas kualitas sistem pengendalian intern, TIM SATGAS BAPPEDA melaksanakan pemantauan melalui dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu (lampiran 5 form 9):

- a. Pelaporan berkala;
- b. Monitoring dan Evaluasi berkala;
- c. Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu lainnya

Rencana Tindak Pengendalian dalam dokumen ini difokuskan pada perbaikan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 serta pada Satuan Tugas SPIP maupun seluruh pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan Pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai. Pembangunan lingkungan pengendalian BAPPEDA bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan aktif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Nomor: 800/083 Tahun 2022 pada tanggal 1 November 2022 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Risiko Strategis dan Risiko Operasional BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yang memiliki mandat tugas untuk

melaksanakan proses pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Disamping itu, juga menerbitkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pedoman perilaku bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, Tim Satgas SPIP telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut antara lain membahas tentang:

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuisisioner *Control Environment Evaluation* (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;
2. Proses penilaian resiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil resiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan resiko pada kegiatan utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian BAPPEDA.

Hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, antara lain:

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survey persepsi melalui pengisian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) oleh pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
2. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner *Control Environment Evaluation* (CEE) dengan focus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak yang tidak memadai dan kurang memadai.

Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control self Assesment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan *review* dokumen. Penilaian kelemahan dokumen dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa laporan hasil *review*, laporan hasil pemeriksaan dan dokumen lainnya.

Dari data yang ada disimpulkan bahwa kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern terdapat 4 (empat) sub unsur yang kurang memadai yaitu:

1. Komitmen terhadap kompetensi;
2. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
3. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
4. Penyusunan dan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah yang efektif.

Berdasarkan hasil *review* dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian Intern pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung

NO	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif	Memadai

NO	SUB UNSUR	KONDISI
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut diatas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Penilaian Pengendalian Yang Belum Memadai

No	Elemen Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai
A	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
	Masih terdapat pegawai yang ditempatkan belum sesuai kompetensi dan pengalaman
	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala
B	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
	Masih adanya pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)
	Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan risiko
C	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT
	Kewenangan yang belum di <i>review</i> secara periodik
D	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Belum ada pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. BAPPEDA Kabupaten Temanggung mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu

mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation* masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan
Lingkungan Pengendalian BAPPEDA
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
1	Komitmen Terhadap Kompetensi		
	Melakukan evaluasi kinerja pegawai dan mengusulkan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya ke BKPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
	Melaksanakan / mengirim mengusulkan peserta mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II Tahun 2023
2	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan		
	Membuat analisis/kajian terkait pegawai yang <i>bersifat adhoc</i> (sementara) ke BKPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
	Melaksanakan sosialisasi dan optimalisasi SOP kegiatan	Kepala BAPPEDA	Januari 2023
3	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat		

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pendelegasian kewenangan secara periodik (Semesteran)	Kepala BAPPEDA	Semester I dan II tahun 2023
4	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia		
	Memberikan atau mengusulkan pegawai yang berprestasi/kompetensi untuk mendapatkan <i>reward</i> atas pengelolaan resiko	Kepala BAPPEDA	Semeter I Tahun 2023

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi pemerintah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun BAPPEDA Kabupaten Temanggung diprioritaskan untuk membangun pengendalian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.

Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung

NO.	Misi	TUJUAN	SASARAN
1.	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan

	Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	evaluasi Pembangunan Daerah 2. Meningkatnya Implementasi hasil Kelitbangan
--	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Dalam rangka mencapai tujuan BAPPEDA Kabupaten Temanggung sebagaimana penjelasan tabel diatas pada Renja 2023, maka menetapkan konteks risiko sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Penetapan Konteks Risiko Operasional BAPPEDA

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Renja 2023		
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan		
Sumber Data	Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
Program Bappeda (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD/RPD)	6 Dok
	2	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6 Buku
	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
	4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok
	5	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan

	6	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dok
	7	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD
	8	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dok
	9	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 PD
	10	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok
	11	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok
	12	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 PD
	13	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan
	14	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan
	15	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dok
	16	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dok
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program :		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Kegiatan :		
	1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

3	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
4	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
7	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
8	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
9	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
10	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
11	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
12	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
13	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
14	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
15	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Dari identifikasi yang dilakukan BAPPEDA Kabupaten Temanggung, risiko-risiko yang diperoleh antara lain (sebagaimana dalam lampiran 1 Form 3c).

C. Hasil Analisis Risiko

Penetapan hasil analisis risiko pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung tersebut mengacu pada dua parameter, yaitu

besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya. Parameter pertama yaitu besarnya dampak/konsekuensi. Klasifikasi besarnya dampak/konsekuensi terbagi dalam 5 kategori, yaitu Sangat kecil, kecil, Sedang, Besar dan Sangat besar, Sedangkan Parameter kedua terbagi dalam 4 kelas antara lain sangat sering, sering, jarang dan sangat jarang.

Tabel 2.6.

Besarnya level dampak/konsekuensi

Kategori Dampak	Skor	Kemungkinan
Sangat signifikan/Sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan /Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak signifikan/ sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 2.7.

Skala Probabilitas Risiko/Kemungkinan pada Bappeda Kabupaten Temanggung

Level Risiko	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41-70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadi risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 40 % atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0-10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

Analisis risiko dilakukan dengan Focused Group Discussion (FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Hasil analisis atas risiko-risiko tersebut diambil pada skala risiko

dengan nilai diatas 15 (lima belas) antara lain: (dapat dilihat pada lampiran 1 form 4)

1. Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi;
2. Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi;
3. Tidak dapat menindaklanjuti dari pusat yang diberlakukan ditengah periode (Perbup Bankeu, Smart City da RTP);
4. Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia;
5. Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk;
6. Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur;
7. Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur;
8. Kekurangan data dan informasi kelitbangan yang akurat.

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Kegiatan Pengendalian yang sudah dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang dilakukan
a	B	c	d
1	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	Tim verifikasi, rapat koordinasi, desk dengan Perangkat Daerah
2	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor P/558/050.3/01.4/X/2022 Perihal Evaluasi Kegiatan s/d TW III
3	Tidak dapat menindaklanjuti dari pusat yang diberlakukan ditengah periode (Perbup Bankeu, Smart City da RTP)	ROO.22.36.28.08	Penyusunan Perbup Bankeu RAD Smart City Proses Penyusunan RTP
4	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD))	ROO.22.36.28.09	Penyusunan Penetapan SK Bupati terkait lokasi TMMD
5	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk	ROO.22.36.28.14	Rembug MPIG, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, reorganisasi
6	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov
7	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang dilakukan
a	B	c	d
8	Kekurangan data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan)

E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Kegiatan Pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	Tim verifikasi, rapat koordinasi, desk dengan Perangkat	Perangkat Daerah tidak melakukan rekomendasi dari	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptimalka	Kepala Bidang PEIPD	Desember 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			Daerah	Tim Verifikasi, SDM Tim Veifikasi yang belum optimal	n Tim verifikasi		
2	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor P/558/050.3/01.4/X/2022 Perihal Evaluasi Kegiatan s/d TW III	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan <i>punishment</i> kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Kepala Bidang PEIPD	Triwulan II 2023
3	Tidak dapat menindaklanjuti dari pusat yang diberlakukan ditengah periode (Perbup Bankeu, Smart City dan RTP)	ROO.22.36.28.08	Penyusunan Perbup Bankeu RAD Smart City Proses Penyusunan RTP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang	1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah	Kepala Bidang PPMP	Desember 2023

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
				teridentifikasi	disusun		
4	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD))	ROO.22.36.28.09	Penyusunan Penetapan SK Bupati terkait lokasi TMMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	TMMD: pemantauan, evaluasi sejak awal sampai akhir	Kepala Bidang PPMP	Semester I dan Semester II 2023
5	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	ROO.22.36.28.14	Rembug MPIG, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, reorganisasi	Masih anggota MPIG yang tidak menerapkan SOP	Rembug MPIG, penguatan kelembagaan MPIG, reorganisasi, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk kajian-kajian, bintek, dan sosialisasi	Kepala Bidang PESDAI	Januari-Desember

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangan i risiko yang teridentifikasi	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Kepala Bidang PESDAI	Triwulan II 2023
7	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangan i risiko yang teridentifikasi	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur dan melaksanakan perencanaan dengan cermat	Kepala Bidang PESDAI	Triwulan II 2023
8	Kekurangan data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadmini	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangan	Desiminasi informasi terhadap <i>stakeholders</i> terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing	Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian Bidang LITBANG	Triwulan IV 2022

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			strasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan)	i risiko yang teridentifikasi	daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan		

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan informasi dan Komunikasi Rencana Tindak Pengendalian secara rinci sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.10.

Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Be ntuk Sarana Pengkom unikasi	Penyedia Informasi	Peneri ma Inform asi	Rencana Waktu Pelaksa naan	Realisas i Waktu Pelaksa naan	Keteranga n
a	B	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptima	Rapat Koordinasi /Desk	BAPPEDA	Perang kat Daerah	Triwulan I 2023		Belum dilaksana kan dan ditindakla njudi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
	lkan Tim verifikasi						
2	Kebijakan punishment kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Desk/Surat Edaran	BAPPEDA	Perangkat Daerah	Triwulan I 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
3	1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah disusun	Rapat Koordinasi	BAPPEDA	Perbup Bankeu : masyarakat yang mengajukan proposal dan PD teknis Smart City: PD terkait dan stakeholders	Desember 2022 dan Triwulan I 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
4	TMMD: pemantauan , evaluasi sejak awal sampai akhir	Rapat Koordinasi	BAPPEDA	Desa yang mengajukan proposal TMMD dan PD Teknis	Semester I dan Semester II 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Be ntuk Sarana Pengkom unikasi	Penyedia Informasi	Peneri ma Inform asi	Rencana Waktu Pelaksa naan	Realisas i Waktu Pelaksa naan	Keteranga n
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
5	Rembug MPIG, penguatan kelembagaa n MPIG, reorganisasi , monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk kajian-kajian, bintek, dan sosialisasi						
6	Mengusulka n Non APBD sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Desk	BAPPEDA	Perang kat Daerah Terkait	Triwulan I 2023		Belum dilaksana kan dan ditindakla njudi
7	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktu r dan melaksanak an perencanaa n dengan cermat	Desk	BAPPEDA	Perang kat Daerah Terkait	Triwulan I 2023		Belum dilaksana kan dan ditindakla njudi
8	Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadmini strasian data dukung inovasi dan daya saing	1. Sosialisasi 2. Pengumpu lan data dukung 3. Desk dan klarifikasi data dukung 4. Melengkap	BAPPEDA, Perangkat Daerah Terkait, Instansi Vertikal, Lembaga Pemerinta h dan Non Pemerinta h	Bapped a	Bulan Desembe r 2022		Belum dilaksana kan dan ditindakla njudi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Be ntuk Sarana Pengkom unikasi	Penyedia Informasi	Peneri ma Inform asi	Rencana Waktu Pelaksa naan	Realisas i Waktu Pelaksa naan	Keteranga n
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
	daerah (penelitian dan pengembang an) dan pengumpula n data yang dilaksanaka n di tahun berjalan	i data dukung					

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. BAPPEDA Kabupaten Temanggung membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan reuiu. Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan BAPPEDA Kabupaten Temanggung bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.

Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptimalkan Tim verifikasi	Rapat Koordinasi/Desk	Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah	Triwulan I,II,III,IV		Didokumentasikan
2	Kebijakan punishment kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BAPPEDA			Didokumentasikan
3	1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah disusun	Perbup Bankeu: rapat koordinasi Smart City: rapat koordinasi, pemantauan lapangan	Tim Koordinasi TMMD, Dewan Smart City, PD terkait	Semester I dan Semester 2 2023		Didokumentasikan
4	TMMD: pemantauan, evaluasi sejak awal sampai akhir	Lapangan dan rapat koordinasi	Tim Koordinasi TMMD	Semester I dan Semester 2 2023		Didokumentasikan
5	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Monev dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BAPPEDA	Triwulan IV 2023		Didokumentasikan
6	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur dan melaksanakan	Monev dan laporan pelaksanaan	Kepala BAPPEDA	Triwulan IV 2023		Didokumentasikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	perencanaan dengan cermat	aan kegiatan				
7	Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan	Evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bappeda	Bulan Desember Tahun 2022		Didokumentasikan dan dipublikasikan

2. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Kabupaten Temanggung melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, BAPPEDA Kabupaten Temanggung melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana perbaikan dalam dokumen RTP ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh karena itu guna ketercapaian tujuan, maka Satuan Tugas SPIP Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pemantauan

berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Controll Self Assessment*) melakukan perbaikan RTP.

Pemantuan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak lanjut pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

VI. PENUTUP

Pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 3 Misi, 8 tujuan dan 53 indikator sasaran yang perlu dapat perhatian pada capaian upaya keras, indikator sasaran tersebut terbagi pada Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Tindak pengendalian Operasional Bappeda tidak lepas dari Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Daerah dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis BAPPEDA. Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Kabupaten Temanggung Risiko Staregis lebih diprioritaskan pada Misi Pertama yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya”. Dengan hal tersebut dikarenakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung sebesar 20,5% (berdasarkan data SSGI Tahun 2021), isu strategis dalam perubahan RPJMD 2018-2023 serta arahan dari Presiden RI bahwa target prevalensi stunting 14% di tahun 2024.

Fungsi BAPPEDA adalah sebagai koordinator kegiatan di semua Perangkat Daerah, salah satunya yang lebih di prioritaskan untuk memfasilitasi koordinasi pada Misi Pertama yang terkait dengan “Stunting”

Sehingga Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berdasarkan pada perubahan RPJMD 208-2023 mengacu pada Misi Ketiga yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas” dan dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang ditetapkan sebagai langkah awal dan wujud penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai BAPPEDA untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional ini akan menjadi dokumen yang terus – menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Sehingga pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang telah ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan pertanggungjawaban atau *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Selanjutnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional BAPPEDA Tahun 2023 menjadi sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST.MT
Pembina
NIP. 19740508 2001312 1 008

E		PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																														-	Kurang Memadai														
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	Memadai		
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	Memadai	
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	2	2	2	3	3	2	3	3	4	2	3	2	2	4	2	2	3	2	4	2	2	3	2	4	2	3	3	4	2	1	3	4	2	3	3	3	3	2	4	4	3	2	Kurang Memadai		
F		PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																														3	Kurang Memadai														
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	2	1	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	Memadai				
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	3	3	2	3	3	3	2	4	4	2	2	3	2	4	3	3	3	1	2	2	4	3	4	3	3	2	3	4	2	1	3	4	2	1	3	3	3	3	3	3	3	Memadai		
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	4	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	3	4	4	3	3	1	2	3	4	3	4	4	3	2	3	4	2	2	2	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai		
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	3	2	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	1	2	3	4	3	4	3	4	2	3	4	2	1	2	4	2	3	2	3	3	4	3	3	3	Memadai		
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	3	1	2	1	2	3	2	2	1	2	3	1	3	4	2	3	3	2	1	3	4	3	4	2	3	2	3	4	3	1	2	2	2	2	2	2	3	4	3	3	2	Kurang Memadai		
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	3	2	3	3	3	3	2	4	4	2	3	2	4	4	4	3	3	1	1	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	1	3	3	1	4	3	3	3	4	4	4	3	3	Memadai	
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	4	3	2	2	2	2	3	2	4	4	2	3	3	3	4	3	3	3	1	1	3	4	3	4	3	4	2	3	3	2	1	3	3	1	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai	
G		PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																														3	Memadai														
1	Inspektora Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai		
2	Inspektora Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	3	2	4	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai		
3	Inspektora Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai			
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	2	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai		
H		HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																														4	Memadai														
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	Memadai		
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektora, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket. Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian Risiko Strategis Pemda

**CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di BAPPEDA Kabupaten Temanggung**

Nama PD		: Bappeda Kabupaten Temanggung	
Tahun Penilaian		: 2022	
No. <i>a</i>	Sumber Data <i>b</i>	Uraian Kelemahan <i>c</i>	Klasifikasi <i>d</i>
1	Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	Pendataan Pelatihan Pegawai	Belum optimalnya pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko	
3	Laporan Hasil Asistensi Penerapan MRI Kab.Temanggung	Belum dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit pemilik risiko secara berkelanjutan	
5	Pendataan Pegawai Non ASN	Masih adanya pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
6	Hasil Pelaporan Evaluasi Triwulanan	Masih kurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan	
7	Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas SDM perencanaan	
8	Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan	
9	Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019 - 2023	Belum optimalnya integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan	
10	Rapat Internal	Kewenangan yang belum direviu secara periodik	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
11	Rapat Internal	Belum adanya <i>reward</i> dalam penilaian kinerja bagi pegawai	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
12	Laporan Hasil Asistensi Penerapan MRI Kabupaten Temanggung	Belum mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat daerah dan tingkat unit kerja	
	Pendataan Pelatihan Pegawai	Kurangnya peningkatan kompetensi pegawai terkait perencanaan	
13	Dokumen RTP Bappeda Tahun 2022	Belum maksimalnya Inspektorat memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
di BAPPEDA Kabupaten Temanggung**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung							
Tahun Penilaian : 2022							
No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman - Belum adanya pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko - Belum dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit pemilik risiko secara berkelanjutan 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan - Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Penempatan pegawai dalam posisi/jabatan belum sesuai dengan kompetensi - Pelatihan untuk pegawai terkait pengelolaan risiko belum optimal - Peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai masih kurang
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara) - Masih kurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan - Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas SDM perencanaan - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan - Belum optimalnya integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara) - Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara) - Ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan belum optimal - Koordinasi dan sinkronisasi dan sinergi SDM perencanaan belum optimal - Pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan belum optimal - Integrasi perencanaan dan kelitbangan sebagai akselerator pencapaian target pembangunan belum optimal
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan yang belum direviu secara periodik 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan yang belum direviu secara periodik 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu kewenangan belum dilaksanakan secara periodik
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya <i>reward</i> dalam penilaian kinerja bagi pegawai - Belum mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat daerah dan tingkat unit kerja - Kurangnya peningkatan kompetensi pegawai terkait perencanaan 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) 	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pemberian reward dan/ <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Alokasi anggaran untuk penerapan manajemen risiko belum ada - Pelatihan Perencanaan bagi pegawai belum optimal

7	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif	Kurang Memadai	- Belum maksimalnya Inspektorat memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	Memadai		Kurang Memadai	- Inspektorat belum optimal dalam memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai		Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan awal penilaian berdasarkan revidu dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal berdasarkan revidu dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan survei CEE atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom f diisi dengan uraian simpulan survei CEE atas masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom g diisi dengan simpulan fasilitator atas kondisi masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian

Kolom h diisi dengan penjelasan simpulan masing-masing sub unsur lingkungan pengendalian sesuai dengan kolom g

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Renja 2023		
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan		
Sumber Data	Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
Program Bappeda (Renja 2023) dan Kegiatan Utama	1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen
	2	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6 Buku
	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
	4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
	5	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan
	6	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen
	7	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah
	8	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen
	9	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah
	10	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
	11	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
	12	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah
	13	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan
	14	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan
	15	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen
	16	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program :		
	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Kegiatan :		
	1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	3	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	4	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
	5	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	7	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	8	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	9	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
10	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
11	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
12	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
13	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
14	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
15	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : Renja 2023
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Sasaran Strategis OPD : 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 2. Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbitangan
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbitangan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
I	PERENCANAAN										
A	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										
a	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Perencanaan	Tidak semua program dalam RPJMD masuk ke dalam dokumen RKPD	ROO.22.36.28.01	Kepala Bidang PEIPD	Keterbatasan kemampuan keuangan daerah	Internal	UC	Beberapa program dalam RPJMD tidak teranggarkan dalam RKPD	Perangkat Daerah
			Perencanaan	Usulan program dalam Renstra PD tidak memperhatikan perkembangan SOTK	ROO.22.36.28.02	Kepala Bidang PEIPD	Ketidaktermatan PD dalam mengusulkan program yang mengakomodir perkembangan SOTK dalam rancangan Renstra PD	Internal	C	Program dalam Renstra PD tidak konsisten dengan program dalam Renja PD	Perangkat Daerah
			Penatausahaan	Adanya program baru dalam RKPD untuk mengakomodir sumber dana DAK	ROO.22.36.28.03	Kepala Bidang PEIPD	Munculnya program baru dalam RKPD untuk mengakomodir sumber dana DAK	Internal	C	Program dalam RPJMD tidak konsisten dengan RKPD	Perangkat Daerah
			Pelaksanaan	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	Kepala Bidang PEIPD	Tahapan dan waktu penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	Internal	C	Penetapan RKPD melampaui waktu yang ditetapkan sesuai regulasi	Perangkat Daerah
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
a	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Pelaksanaan	Adanya data makro yang rilis tidak pada tahun berjalan	ROO.22.36.28.05	Kepala Bidang PEIPD	Data menunggu perhitungan dari BPS	Eksternal	C	Pada indikator makro	Perangkat Daerah
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
a	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Pemantauan dan Evaluasi	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	Kepala Bidang PEIPD	Keterlambatan Perangkat Daerah mengirimkan data capaian	Eksternal	C	Pelaksanaan evaluasi terlambat	Perangkat Daerah
			Pemantauan	Tidak lengkapnya data yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring	ROO.22.36.28.07	Kepala Bidang PEIPD	Ketidaksiapan beberapa Perangkat Daerah	Eksternal	C	Pada monitoring ke lapangan	Perangkat Daerah
B	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (Perbuk Bankeu, Smart City, RTP)	ROO.22.36.28.08	Kepala Bidang PPMP	Perbuk Bankeu: dinamika perubahan kebijakan Smart City: belum optimalnya peran fungsi dewan smart city RTP: waktu turunnya regulasi pada periode berjalan	Internal dan Eksternal	C	Rencana aksi belum berjalan optimal	Bappeda, Perangkat Daerah Terkait

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pemantauan	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD))	ROO.22.36.28.09	Kepala Bidang PMP	Data belum dipublish, pendataan masih proses atau berjalan, data tidak tersedia	Eksternal	C	Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan tidak dapat langsung disusun tepat waktu	Bappeda, Perangkat Daerah Terkait
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (pangan gizi, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD))	ROO.22.36.28.10	Kepala Bidang PMP	Waktu turunnya regulasi pada periode berjalan	Internal dan Eksternal	C	Tidak ada pembaharuan dokumen sesuai dengan regulasi yang baru	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah, Masyarakat
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Pemantauan	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia	ROO.22.36.28.11	Kepala Bidang PMP	Data belum dipublish, pendataan masih proses atau berjalan, data tidak tersedia	Internal	C	Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan tidak dapat langsung disusun tepat waktu	Perangkat Daerah
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan	Belum optimalnya kelembagaan Klaster Pengembangan Ekonomi lokal	ROO.22.36.28.12	Kepala Bidang PESDAI	Anggota klater banyak yang keluar masuk karena rata-rata anggotanya UMKM mempunyai beberapa bidang usaha disesuaikan dengan situasi dan kondisi	Internal dan Eksternal	C	Pengembangan kelembagaan Klaster dan pengembangan ekonomi lokal masyarakat kurang optimal	Anggota Klaster
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Pemantauan	Kurang lengkapnya data yang tersedia pada saat monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah urusan perekonomian	ROO.22.36.28.13	Kepala Bidang PESDAI	Kurangnya pemahaman atas data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah urusan perekonomian	Internal	C	laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah urusan Perekonomian tidak lengkap	Perangkat Daerah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pelaksanaan	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	ROO.22.36.28.14	Kepala Bidang PESDAI	Pengurus dan anggota MPIG kurang berperan aktif dalam memajukan peran MPIG	Internal	C	Kualitas produk anggota MPIG tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan	Anggota MPIG Kopi Robusta Temanggung, MPIG Arabica Sindoro sumbing, MPIG Tembakau Srintil dan MPIG ikan uceng
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	Kepala Bidang PESDAI	Dukungan anggaran yang kurang maksimal untuk program prioritas	Internal	C	Tidak tercapainya target pembangunan	Perangkat Daerah, Masyarakat
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perencanaan	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	Kepala Bappeda/ Kepala Bidang PESDAI	Kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	Internal	C	Menghambat capaian program-program prioritas yang telah disepakati	Perangkat Daerah, Masyarakat

II	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
C	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										
a	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Pelaksanaan	Adanya data dukung Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah yang belum terukur	ROO.22.36.28.17	Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian Bidang LITBANG	Belum terukurnya Indikator (Indeks) Kinerja Utama Perangkat Daerah atau belum adanya rumus perhitungan	Internal dan Eksternal	C	Beberapa Indikator yang tidak dapat diketahui nilainya	Perangkat Daerah
b	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Penatausahaan	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian Bidang LITBANG	Belum adanya evaluasi terhadap tertib administrasi data kelitbangan tahun sebelumnya yang akurat	Internal dan Eksternal	C	Evaluasi data dan informasi serta kegiatan kelitbangan belum terlaksana dengan optimal	Perangkat Daerah
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										
a	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Pelaksanaan	Belum optimalnya kelembagaan forum TJSLP	ROO.22.36.28.19	Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi Bidang LITBANG	Kurangnya komunikasi dan koordinasi internal forum TJSLP	Eksternal	C	Beberapa kegiatan TJSLP belum terfasilitasi dengan baik	Perangkat Daerah dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Kurangnya koordinasi kegiatan KKN oleh pihak akademisi	ROO.22.36.28.20	Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi Bidang LITBANG	Komunikasi dan koordinasi belum semuanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan KKN	Eksternal	C	Pelaksanaan KKN kurang optimal	Perangkat Daerah dan Masyarakat
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
a	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pelaksanaan	Belum optimalnya penjarangan krenova masyarakat, pelajar dan Perangkat Daerah	ROO.22.36.28.21	Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi Bidang LITBANG	Keterbatasan informasi, waktu dan sarana dalam mengikuti ajang lomba krenova	Internal dan Eksternal	C	Beberapa krenova masyarakat, pelajar dan Perangkat daerah belum terjaring semuanya	Perangkat Daerah dan Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan kode risiko

Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*.

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama PD : Bappeda Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Risiko Operasional Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1	Tidak semua program dalam RPJMD masuk ke dalam dokumen RKPD	ROO.22.36.28.01	3	3	9
2	Usulan program dalam Renstra PD tidak memperhatikan perkembangan SOTK	ROO.22.36.28.02	3	2	6
3	Adanya program baru dalam RKPD untuk mengakomodir sumber dana DAK	ROO.22.36.28.03	2	2	4
4	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	5	4	20
5	Adanya data makro yang rilis tidak pada tahun berjalan	ROO.22.36.28.05	3	4	12
6	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	4	4	16
7	Tidak lengkapnya data yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring	ROO.22.36.28.07	3	3	9
8	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (Perbup Bankeu, Smart City, RTP)	ROO.22.36.28.08	4	5	20
9	Kurang lengkap dan lambat data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMDD))	ROO.22.36.28.09	4	5	20
10	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (pangan gizi, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD))	ROO.22.36.28.10	3	3	9
11	Kurang lengkap dan lambat data yang tersedia	ROO.22.36.28.11	3	3	9
12	Belum optimalnya kelembagaan Klaster Pengembangan Ekonomi lokal	ROO.22.36.28.12	4	3	12
13	Kurang lengkapnya data yang tersedia pada saat monitoring dan evaluasi	ROO.22.36.28.12	4	3	12
14	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk	ROO.22.36.28.14	4	4	16
15	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	4	4	16
16	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	5	4	20
17	Adanya data dukung Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah yang belum terukur	ROO.22.36.28.17	4	3	12
18	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	5	4	20
19	Belum optimalnya kelembagaan forum TJSLP	ROO.22.36.28.19	4	3	12
20	Kurangnya koordinasi kegiatan KKN oleh pihak akademisi	ROO.22.36.28.20			
21	Belum optimalnya penjangkaran krenova masyarakat, pelajar dan Perangkat Daerah	ROO.22.36.28.21	3	3	9

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 3c

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Risiko Operasional Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	20	Kepala Bidang PEIPD	Tahapan dan waktu penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	Penetapan RKPD melampaui waktu yang ditetapkan sesuai regulasi
2	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	16	Kepala Bidang PEIPD	Keterlambatan Perangkat Daerah mengirimkan data capaian	Pelaksanaan evaluasi terlambat
3	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (Perbup Bankeu, Smart City, RTP)	ROO.22.36.28.08	20	Kepala Bidang PPMP	Perbup Bankeu: dinamika perubahan kebijakan Smart City: belum optimalnya peran fungsi dewan smart city RTP: waktu turunnya regulasi pada periode berjalan	Rencana aksi belum berjalan optimal
4	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD))	ROO.22.36.28.09	20	Kepala Bidang PPMP	Waktu turunnya regulasi pada periode berjalan	Tidak ada pembaharuan dokumen sesuai dengan regulasi yang baru
5	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	ROO.22.36.28.14	16	Kepala Bidang PESDAI	Pengurus dan anggota MPIG kurang berperan aktif dalam memajukan peran MPIG	Kualitas produk anggota MPIG tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan
6	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	16	Kepala Bidang PESDAI	Dukungan anggaran yang kurang maksimal untuk program prioritas	Tidak tercapainya target pembangunan
7	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	20	Kepala Bidang PESDAI	Kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	Menghambat capaian program-program prioritas yang telah disepakati

8	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	20	Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian Bidang LITBANG	Belum adanya evaluasi terhadap tertib administrasi data kelitbangan tahun sebelumnya yang akurat	Evaluasi data dan informasi serta kegiatan kelitbangan belum terlaksana dengan optimal
---	------------------------------------------------------	-----------------	----	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko

Kolom e diisi dengan pemilik risiko

Kolom f diisi dengan penyebab

Kolom g diisi dengan dampak

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama PD		: Bappeda Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian		: 2022		
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I Komitmen terhadap kompetensi				
1	Pegawai yang kompeten belum secara tepat mengisi posisi/jabatan	Melakukan evaluasi kinerja pegawai dan mengusulkan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya ke BKPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
2	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Melaksanakan/mengirim/mengusulkan peserta mengikuti pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
II Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan				
1	Masih adanya pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	Membuat analisis/kajian terkait pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara) ke BKPPSDM	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
2	Belum adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Melaksanakan sosialisasi dan optimalisasi SOP kegiatan	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
III Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
1	Kewenangan yang belum direviu secara periodik	Melaksanakan koordinasi dan evaluasi pendelegasian kewenangan secara periodik (Semesteran)	Kepala BAPPEDA	Semester II 2023
IV Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM				
1	Belum adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Memberikan atau mengusulkan pegawai yang berprestasi/kompetensi untuk mendapatkan reward atas pengelolaan resiko	Kepala BAPPEDA	Semester I 2023

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung						
Tahun Penilaian	: 2022						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas						
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	Risiko Operasional Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
1	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	Tim verifikasi, rapat koordinasi, desk dengan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah tidak melakukan rekomendasi dari Tim Verifikasi, SDM Tim Verifikasi yang belum optimal	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptimalkan Tim verifikasi	Kepala Bidang PEIPD	Desember 2023
2	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor P/558/050.3/01.4/X/2022 Perihal Evaluasi Kegiatan s/d TW III	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Kebijakan <i>punishment</i> kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Kepala Bidang PEIPD	Triwulan II 2023
3	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (Perbup Bankeu, Smart City, RTP)	ROO.22.36.28.08	Penyusunan Perbup Bankeu RAD Smart City Proses Penyusunan RTP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah disusun	Kepala Bidang PPMP	Desember 2023
4	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD))	ROO.22.36.28.09	Penyusunan Penetapan SK Bupati terkait lokasi TMMD	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	TMMD: pemantauan, evaluasi sejak awal sampai akhir	Kepala Bidang PPMP	Semester I dan Semester II 2023
5	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	ROO.22.36.28.14	Rembug MPIG, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, reorganisasi	Masih anggota MPIG yang tidak menerapkan SOP	Rembug MPIG, penguatan kelembagaan MPIG, reorganisasi, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perumahan Tinggi untuk kajian kajian	Kepala Bidang PESDAI	Januari- Desember
6	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Kepala Bidang PESDAI	Triwulan II 2023
7	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur dan melaksanakan perencanaan dengan cermat	Kepala Bidang PESDAI	Triwulan II 2023
8	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	Desiminasi informasi terhadap <i>stakeholders</i> terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan)	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Desiminasi informasi terhadap <i>stakeholders</i> terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan	Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian Bidang LITBANG	Triwulan IV 2022

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif.

(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbang

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptimalkan Tim verifikasi	Rapat Koordinasi/Desk	BAPPEDA	Perangkat Daerah	Triwulan I 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
2	Kebijakan punishment kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Desk/Surat Edaran	BAPPEDA	Perangkat Daerah	Triwulan I 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
3	1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah disusun	Rapat Koordinasi	BAPPEDA	Perbup Bankeu: masyarakat yang mengajukan proposal dan PD teknis Smart City: PD terkait dan stakeholders	Desember 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
4	TMMD: pemantauan, evaluasi sejak awal sampai akhir	Rapat Koordinasi	BAPPEDA	Desa yang mengajukan proposal TMMD dan PD Teknis	Semester I dan Semester II 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
5	Rembug MPIG, penguatan kelembagaan MPIG, reorganisasi, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk kajian-kajian, bintek, dan sosialisasi	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	BAPPEDA	Anggota MPIG Kabupaten Temanggung	Semester II 2023		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
6	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Desk	BAPPEDA	Perangkat Daerah Terkait	Triwulan I 2022		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
7	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur dan melaksanakan perencanaan dengan cermat	Desk	BAPPEDA	Perangkat Daerah Terkait	Triwulan I 2022		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti
8	Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan	1. Sosialisasi 2. Pengumpulan data dukung 3. Desk dan klarifikasi data dukung 4. Melengkapi data dukung	BAPPEDA, Perangkat Daerah Terkait, Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	Bappeda	Bulan Desember 2022		Belum dilaksanakan dan ditindaklanjuti

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama PD	: Bappeda Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian	: 2022					
Tujuan Strategis	: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
Urusan Pemerintahan	: Perencanaan dan Kelitbangan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptimalkan Tim verifikasi	Rapat Koordinasi/Desk	Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah	Triwulan I,II,III,IV		Didokumentasikan
2	Kebijakan punishment kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BAPPEDA			Didokumentasikan
3	1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah disusun	Perbup Bankeu: rapat koordinasi Smart City: rapat koordinasi, pemantauan lapangan	Tim Koordinasi TMMD, Dewan Smart City, PD terkait	Semester I dan Semester 2 2023		Didokumentasikan
4	TMMD: pemantauan, evaluasi sejak awal sampai akhir	Laporan dan rapat koordinasi	Tim Koordinasi TMMD	Semester I dan Semester 2 2023		Didokumentasikan
5	Rebug MPIG, penguatan kelembagaan MPIG, reorganisasi, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk kajian-kajian, bintek, dan sosialisasi	Monev dan laporan pelaksanaan kegiatan	Ketua MPIG Kopi Robusta, MPIG Kopi Arabica MPIG Uceng, MPIG Tembakau Srintel	Semester II 2023		Didokumentasikan
6	Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Monev dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BAPPEDA	Triwulan IV 2023		Didokumentasikan
7	Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur dan melaksanakan perencanaan dengan cermat	Monev dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BAPPEDA	Triwulan IV 2023		Didokumentasikan
8	Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan	Evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala BAPPEDA	Bulan Desember Tahun 2022		Didokumentasikan dan dipublikasikan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Bappeda Kabupaten Temanggung										
Tahun Penilaian : 2022										
Tujuan Strategis : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas										
Urutan Pemerintahan : Perencanaan dan Kelitbangan										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan									
1	Penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	ROO.22.36.28.04	Triwulan III 2022	Tahapan dan waktu penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai dengan regulasi	Penetapan RPKD melampaui waktu yang ditetapkan sesuai regulasi		Peningkatan kapasitas SDM perencanaan Perangkat Daerah, Rapat Koordinasi, Mengoptimalkan Tim verifikasi	Triwulan I 2023		
2	Ada beberapa Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi	ROO.22.36.28.06	Triwulan III 2022	Keterlambatan Perangkat Daerah mengirimkan data capaian	Pelaksanaan evaluasi terlambat		Kebijakan punishment kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian	Triwulan I 2023		
3	Tidak dapat menindaklanjuti regulasi dari pusat yang diberlakukan di tengah periode (Perbup Bankeu, Smart City, RTP)	ROO.22.36.28.08	2021	Perbup Bankeu; dinamika perubahan kebijakan Smart City; belum optimalnya peran fungsi dewan smart city RTP; waktu turunnya regulasi pada periode berjalan	Rencana aksi belum berjalan optimal		1. Melaksanakan komitmen sesuai regulasi (verifikasi proposal bankeu) 2. Melaksanakan quick win yg telah diterapkan dalam RAD smart city 3. Komitmen dengan regulasi yang sudah disusun	Desember 2023		
4	Kurang lengkap dan lambatnya data yang tersedia (pelaksanaan Smart City, Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPKP), TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD))	ROO.22.36.28.09	Triwulan III 2022	Waktu turunnya regulasi pada periode berjalan	Tidak ada pembaharuan dokumen sesuai dengan regulasi yang baru		TMMD: pemantauan, evaluasi sejak awal sampai akhir	Semester I dan Semester II 2023		
5	Belum optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	ROO.22.36.28.14	Triwulan II 2022	Pengurus dan anggota MPIG kurang berperan aktif dalam memajukan peran MPIG	Kualitas produk anggota MPIG tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan		Rebug MPIG, penguatan kelembagaan MPIG, reorganisasi, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk kajian-kajian, bintek, dan sosialisasi	Semester II 2023		
6	Kurang maksimalnya dukungan anggaran untuk program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.15	Maret 2022	Dukungan anggaran yang kurang maksimal untuk program prioritas	Tidak tercapainya target pembangunan		Mengusahakan sumber anggaran lain seperti APBN, DAK, Bankeu Prov	Triwulan I 2022		
7	Adanya kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	ROO.22.36.28.16	Maret 2022	Kesalahan dalam penentuan program prioritas bidang infrastruktur	Menghambat capaian program-program prioritas yang telah disepakati		Melakukan desk kegiatan bidang infrastruktur dan melaksanakan perencanaan dengan cermat	Triwulan I 2022		
8	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	ROO.22.36.28.18	Bulan Juli s.d. September Tahun 2022	Belum adanya evaluasi terhadap tertib administrasi data kelitbangan tahun sebelumnya yang akurat	Evaluasi data dan informasi serta kegiatan kelitbangan belum terlaksana dengan optimal		Desiminasi informasi terhadap stakeholders terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan	Bulan Desember 2022		
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan